

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.
PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG**



**Diajukan Oleh :
RASIDI
041170009**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Ahli Madya
PALEMBANG
2020**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LTA

NAMA : RASIDI
NOMOR POKOK : 041170009
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG

Tanggal : 10 Juli 2020

Mengetahui,

Pembimbing

Direktur

Dr. Febrianty, S.E., M.Si
NIDN : 0013028001

Benedictus Effendi, S.T., M.T
NIP : 09.PCT.13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LTA

NAMA : RASIDI
NOMOR POKOK : 041170009
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
JUDUL : ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG

Tanggal : 13 Agustus 2020
Penguji 1,

Mengetahui,
Tanggal : 13 Agustus 2020
Penguji 2,

Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak
NIDN : 0204068901

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si
NIDN : 0225128802

Menyetujui,
Direktur

Benedictus Effendi, S.T., M.T
NIP : 09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *Bersyukurlah atas nikmat yang diberi Allah SWT karena bersyukur kunci dari segala semua kekurangan itu sendiri.*
- *Teruslah berdoa dan usaha agar apa yang kamu inginkan insyallah tercapai.*

PERSEMBAHAN:

- *ALLAH yang maha esa yang tak hentinya memberi kenikmatan, karunia, dan rezekinya.*
- *Bapak / (alm) ibuku yang sangat aku cintai.*
- *Saudara / saudari yang selalu memberi suportnya kepada ku.*
- *Sahabat dan teman seperjuangan ku.*
- *Serta Dosen dan staf Akuntansi Palcomtech.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Sholawat beserta salam juga penulis sanjungkan kepada Rasul Allah SWT Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis ini mengambil judul **“ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG”**, yang terbagi dalam empat bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Keadaan tempat LTA, Bab III Hasil dan Capaian Kegiatan PKL, Bab IV Penutup.

Adapun selama penulisan dan penyusunan laporan LTA ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Direktur Politeknik PalComTech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T
2. Pembantu Direktur 1, Bapak D.Tri Octavian, S.Kom., M.Kom
3. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si., Ak
4. Dosen pembimbing LTA, Ibu Dr. Febrianty, S.E.,M.Si
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta.
6. Teman dan Sahabat yang terkasih.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1..Latar Belakang.....	1
1.2...Batasan Masalah.....	4
1.3...Rumusan Masalah.....	5
1.4...Tujuan Penelitian.....	5
1.5...Manfaat Penelitian.....	5
1.6...Sistematika Penulisan.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1..Landasan Teori.....	8
2.1.1....Pengertian Sistem.....	8
2.1.2....Pengertian Informasi.....	9
2.1.3....Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.....	11
2.1.4....Unsur – Unsur Sistem Informasi Akuntansi.....	13
2.1.5....Tujuan Sistem Informasi Akuntansi.....	13
2.1.6....Pengertian Pajak.....	15
2.1.7....Ciri – Ciri Pajak.....	16
2.1.8....Fungsi Pajak.....	16
2.1.9....Syarat Pemungutan Pajak.....	18

2.1.10..Teori – Teori Mendukung Pemungutan Pajak.....	19
2.1.11..Pengelompokan Pajak.....	20
2.1.12..Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu	23
2.3. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.... Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Data.....	26
3.2.2... Sumber Data.....	27
3.2.... Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3.... Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.... Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.1.1 Sejarah PT PUSRI Palembang	30
4.1.2 Visi & Misi PT PUSRI Palembang.....	32
4.1.3 Sarana & Prasarana PT PUSRI Palembang.....	33
4.1.4 Struktur Organisasi PT PUSRI Palembang.....	35
4.1.5 Tugas & Wewenang Direktur PT PUSRI Palembang..	36
4.2.... Hasil Penelitian & Pembahasan	37
4.2.1 Prosedur Perhitungan & Pelaporan PPN di PT PUSRI Palembang.....	37
4.2.2 Dokumen Terkait Dalam Pelaporan PPN di PT PUSRI Palembang.....	47
4.2.3 Cara pengisian e-SPT PPN.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT PUSRI Palembang.....	35
Gambar 4.2 Flowchart Penjualan dan Penerimaan	40
Gambar 4.3 Flowchart Penjualan dan Penerimaan	41
Gambar 4.4 Flowchart Pembelian dan Pembayaran	44
Gambar 4.5 Flowchart Pelaporan PPN	46
Gambar 4.6 Deliveri Note	47
Gambar 4.7 SPT Masa PPN.....	47
Gambar 4.8 Faktur Pembelian.....	48
Gambar 4.9 sales order	48
Gambar 4.10 purchase order.....	48
Gambar 4.11 Sales Invoice.....	49
Gambar 4.12 Faktur Pajak.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	23
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- 1....Lampiran 1. *Form* Topik dan judul (*Fotocopy*)
- 2....Lampiran 2. Surat Balasan Dari Perusahaan (*Fotocopy*)
- 3....Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
- 4....Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
- 5....Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Proposal (*Fotocopy*)
- 6....Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

ABSTRACT

RASIDI, *System Analysis and Procedure of Calculation and Reporting of Value Added Tax at PT. Sriwijaya Palembang Fertilizer.*

The published formula is how to analyze the value added tax reporting system at PT. PUSRI Palembang. The purpose of this study is to discuss the tax payment policies imposed and want to study the system that runs in one large company in Palembang, it is necessary to do an analysis of the value added tax reporting system. In order to know the System Analysis of the Calculation Procedure and Value Added Tax Reporting at PT. PUSRI Palembang.

The method used is a qualitative method. The results of the study can be concluded about the value added tax reporting system at PT. PUSRI is good and transparent as well as a neatly detailed system and few explanations that are not clarified in the sales and disclosure cycle and document receipts.

Keywords: Accounting Information Systems, Reporting and Value Added Tax Procedures.

ABSTRAK

RASIDI, *Analisis Sistem dan Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.*

Rumusan masalahnya adalah bagaimana analisis sistem prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. PUSRI Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk meminimalkan resiko dikenakannya sanksi perpajakan dan ingin mengetahui sistem yang berjalan di salah satu perusahaan besar di Palembang maka perlu dilakukan analisis terhadap sistem pelaporan pajak pertambahan nilai. Agar megetahui Analisis Sistem Dari Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PUSRI Palembang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. PUSRI sudah baik dan transparan serta sistem yang sudah terperinci dengan rapi walaupun ada sedikit keterangan yang kurang diperjelas bagian siklus penjualan dan penerimaan serta keterangan dokumen kuitansi.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pelaporan dan Prosedur Pajak Pertambahan Nilai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai proses berkembangnya Negara, karena pentingnya kita membayar pajak demi kebaikan bersama dan kepentingan bersama pula. Sebagai warga negara yang baik dan benar hendaknya kami membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak merekayasa hasil pajak atau mengurangi jumlah pajak kita. Untuk orang pribadi yang mempunyai mobil mewah pun harus membayar pajak. Kantor pemerintahan yang mempunyai mobil dinas yang biasanya digunakan untuk dinas luar atau untuk keperluan lainnya, juga dikenakan pajak yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk pembangunan fasilitas umum. Hasil dari pembayaran pajak yang kita bayarkan pun akan kita nikmati bersama sebagai masyarakat. Pengadaan merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan untuk pembangunan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada

upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Undang – undang yang mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah undang – undang nomor 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru. Berdasarkan riset terbaru PPN memiliki porsi dalam penerimaan negara yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230.605 triliun, naik menjadi Rp. 298.441 triliun pada tahun 2011. Pemerintah terus mencegah kebocoran terhadap pendapatan pajak dari PPN ini, diantaranya pemerintah menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2012. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mendukung target pemerintah untuk kelangsungan pembangunan nasional bagi bangsa dan Negara kita dengan membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN yaitu undang – undang no. 8 tahun 1983 berikut perubahan – perubahannya, yaitu undang – undang no. 11 tahun 1994, undang – undang no. 18 tahun 2000, dan undang – undang no. 42 tahun 2009. PPN sebagai pajak atas konsumsi hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam daerah Pabean Republik Indonesia .Hal ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yang digunakan dalam pengenaan PPN bahwa PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi atau dimanfaatkan. PPN sebagai

pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa penanggung jawab pemungutan dan pembayaran pajak berada di pihak pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sedangkan pemikul beban (destinataris) pajak berada di pihak pembeli barang atau penerima jasa yang dikenakan PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan undang – undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN adalah undang – undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 42 tahun 2009.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil referensi dari Herrina dan Lili Syafitri (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Family. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan PPN dalam perhitungan dan pelaporan pada CV. Family dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan PPN dalam perhitungan dan pelaporan CV. Family dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 hampir sesuai dengan UU PPN No. 18/2000 dan terbaru No. 42/2009. Metode yang digunakan adalah metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Namun ada beberapa bagian untuk pelaporannya masih ada sedikit kendala, yaitu pelaporan melampaui batas waktu.

Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian (2018) dengan judul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal

Indonesia (PERSERO) Di Makassar. Berdasarkan penelitian dapat ditarik bahwa perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Industri Kapal Indonesia sudah baik dikarenakan karyawan yang bekerja di bagian perpajakan sudah berkompeten di bidang perpajakan. Perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Industri Kapal Indonesia juga telah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009.

Waode Andriani Hasan (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Bumi Mitra Buton Abadi di tahun 2014 dan 2015 tidak menaati prosedur pajak pertambahan nilai namun untuk tahun 2016 PT. Bumi Mitra Buton Abadi sudah sesuai dengan prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas untuk meminimalkan resiko dikenakannya sanksi perpajakan, perlu dilakukan analisis terhadap sistem dan prosedur pelaporan pajak yang sedang berjalan. Maka dalam tugas akhir ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem dan Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang”.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan, dan aktifitas, penelitian ini hanya sebatas pada ruang lingkup Sistem Informasi Akuntansi Dari Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak, yang akan membahas tentang Analisis Sistem Dari Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana analisis sistem dari prosedur perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Pusri Palembang
2. Bagaimana analisis sistem prosedur pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Pusri Palembang

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan resiko dikenakannya sanksi perpajakan, maka perlu dilakukan analisis terhadap sistem pelaporan pajak pertambahan nilai. Agar mengetahui Analisis Sistem Dari Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pusri Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah di dapat selama dibangku pendidikan Politeknik PalComTech.

2. Bagi Politeknik PalComTech

Dapat membina kerjasama yang baik antara PT. Pusri Palembang. Dan juga sebagai tambahan referensi perpustakaan Politeknik PalComTech.

3. Bagi PT. Pusri sriwijaya Palembang

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan untuk pembaca mengenai hasil Analisis Sistem dari Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pada PT. Pusri Sriwijaya palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari V (lima) bab antara lain:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan definisi operasional variabel penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan di bahas mengenai data penelitian perusahaan, hasil pengujian dan pembahasan.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua uraian – uraian pada bab – bab sebelumnya dan juga berisi saran – saran yang diharapkan berguna dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema” merupakan suatu alur input proses output dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan demikian dapat dijelaskan kembali bahwa sistem merupakan suatu kesatuan menyeluruh yang didalamnya terdapat prosedur dan komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung dalam suatu jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebuah sistem dapat juga dikatakan suatu kesatuan yang memiliki stabilitas untuk menerima input lalu memprosesnya dan akhirnya menghasilkan suatu output. Berikut adalah beberapa defenisi pengertian sistem menurut para ahli :

Romney dan Steinbart (2015) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen – komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Djahir dan Pratita (2015) menyatakan bahwa “sistem dikelompokkan menjadi dua bagian yang menekankan pada prosedurnya dan ada yang menekankan pada elemennya. Kedua kelompok ini adalah benar dan tidak bertentangan, yang berbeda adalah cara pendekatannya”

Menurut Azhar Susanto (2013) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi: “Sistem adalah kumpulan/grup dari sub

sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Menurut Sujarweni (2015), sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga dapat dilihat dari elemen – elemennya yang bisa dalam bentuk keluaran dan masukan yang dapat menerima input, mengolah input, dan menghasilkan hasil yang diterapkan.

Dari pengertian sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya sistem dapat mempermudah pekerjaan. Selain itu juga sistem adalah satu kesatuan dari beberapa prosedur yang saling bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas perusahaan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai. Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari prosedur – prosedur dimana prosedur – prosedur tersebut terdiri dari kegiatan – kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih bagian untuk menjamin setiap kegiatan dilakukan secara beragam untuk menyelesaikan transaksi perusahaan yang terjadi.

2.1.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti yang menerimanya. Informasi mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, gambar, kata – kata, angka, huruf, atau simbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi ataupun situasi yang digunakan sebagai dasar untuk bayangan introfeksi dimasa yang akan

datang. Informasi juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, apabila sebuah hasil keputusan didasari oleh sebuah informasi yang tidak akurat maka akan terjadi hal – hal yang dapat merupakan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan tingginya nilai sebuah informasi sehingga mampu mempengaruhi dan melakukan perubahan terhadap keputusan atau kesimpulan. Berikut adalah beberapa definisi pengertian dari informasi .

Menurut Gordon B Davis (2015) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan – keputusan yang sekarang atau keputusan – keputusan yang akan datang.

Menurut Jogiyanto yang dikutip oleh Machmud (2013) adalah sebagai berikut: “Informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. Jadi informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang.

Menurut McLeod (2010) merupakan data yang telah diproses atau memiliki arti. Adapun karakteristik penting yang harus dimiliki oleh informasi, seperti : relevansi, akurat, ketepatan waktu, dan kelengkapan.

Informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan (Winarno, 2006). Data adalah representasi suatu objek. Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk digunakan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Data yang belum diolah belum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Romney (2014) berpendapat bahwa informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu data – data yang diperoleh dan dikumpulkan menjadi satu bagian yang paling penting dalam pengambilan keputusan sehingga tidak akan terjadinya suatu kesalahan karena semua data yang di diperoleh sudah tepat, akurat dan relevan.

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis. SIA akan memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan. Dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat, biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien. Dari sini dapat disimpulkan bahwa SIA merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut.

Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Berikut ini beberapa defenisi pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli sebagai berikut.

Menurut Azhar Susanto (2017) Sistem informasi akuntansi dapat di definisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem / komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf menyatakan bahwa: Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan.

Menurut Romney dan Steinbart (2015) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengelola data untuk menghasilkan suatu informasi untuk mengambil kaputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi data perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah proses untuk melaporkan seluruh kegiatan produksi maupun yang berkaitan dengan cara kerja sebuah

perusahaan serta sekumpulan data – data yang berguna bagi pihak – pihak perusahaan.

2.1.4 Unsur – Unsur Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2015) sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen, yaitu:

1. Orang – orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur – prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas – aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses – proses bisnis organisasi.
4. *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

2.1.5 Tujuan Informasi Akuntansi

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Mulyadi (2014) menyatakan ada beberapa tujuan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi, antara lain :

1. Untuk menyediakan informasi bagi usaha baru. Kebutuhan informasi pada usaha baru sangat penting untuk mampu bersaing dalam dunia usaha. Informasi yang dibutuhkan oleh usaha baru diantaranya

informasi mengenai peluang bisnis, bagaimana menghadapi pelanggan, menghadapi komplain, dan bahkan sampai dalam taktik bisnis maupun penjualan sampai dalam pengambilan keputusan dalam segala jenis bagian usaha.

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan dari sistem yang sudah ada atau sistem lama. Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan sistem akuntansi. Pada perusahaan di bidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.
3. Untuk memperbaiki sistem pengendalian intern perusahaan sehingga dapat mempermudah menjaga kekayaan perusahaan. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk mengurangi biaya kegiatan klerikal dalam kegiatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali

untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.

2.1.6 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2011) yaitu :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi

wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran negara dan pembangunan sosial.

2.1.7 Ciri – Ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011) ciri – ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budget*, yaitu mengatur.

2.1.8 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan kerana pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, berikut ada 4 fungsi pajak :

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai

sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016 : 4) yaitu :

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang, dan pelaksanaan pemungutan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.”

2.1.10 Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut mardismo (2016) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing – masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya masing – masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban .

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.11 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan kendaraan bermotor.
- Pajak Kabupaten / Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.12 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang padajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

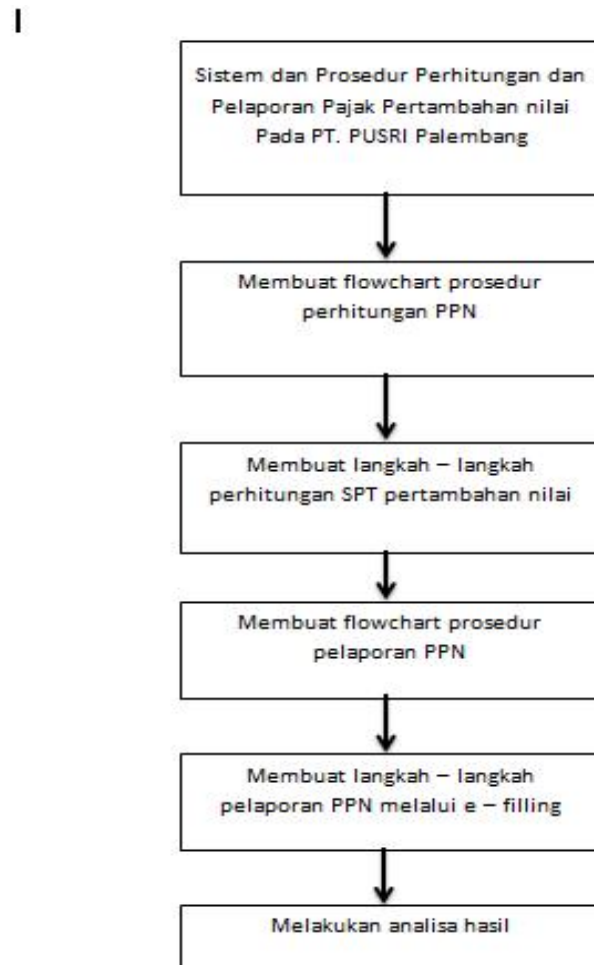
No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Herrina, Lili Syafitri (2013)	Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Family	Deskriptif dan kualitatif	Penerapan PPN dalam perhitungan dan pelaporan CV. Family dari tahun 2009-2010 hampir sesuai dengan UUD PPN No. 18/2000 dan terbaru No. 42/2009.	Persamaan dari penelitian ini sama – sama menganalisis PPN di masing – masing perusahaan apakah sudah sesuai UUD PPN No.18/2000 dan terbaru No.42/2009. Perbedaan penelitian ini pada perusahaan CV dan PT yang milik BUMN
2	Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian. (2018)	Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Industri kapal indonesia (persero) di Makassar	Kualitatif Dan kuantitatif	Perhitungan dan pelaporannya sudah baik, karena karyawan bagian perpajakan sudah berkompeten. Dan telah sesuai UU PPN No. 42 tahun 2009	Persamaan penelitian ini sama pakai data kualitatif Perbedaan yang mencolok pada penelitian ini pada metode kuantitatif
3	Andriani hasan	Analisis pelaporan	Deskriptif dan	Pelaporan PPN pada PT. Bumi putera	Persamaan penelitian ini sama – sama lebih

	(2018)	pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Bumi mitra button abadi	Kualitatif	button abadi di tahun 2014-2015 tidak menaati prosedur PPN, namun di tahun 2016 sudah sesuai prosedur UUD No. 42 tahun 2009	menjurus pelaporan dan sistem. Perbedaannya pada penelitian terdahulu selain menganalisi PPN dia juga menganalisis laporan laba rugi.
--	--------	--	------------	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011).

Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menegtahui prosedur perhitungan pajak, prosedur pelaporan pajak, dan prosedur penyetoran pajak di PT Pupuk Sriwijaya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebgai berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk dan industri kimia PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sejak tanggal 9 Maret – 9 April

Berikut merupakan informasi mengenai perusahaan tempat pelaksanaan Tugas Akhir:

Nama Perusahaan : PT. Pupuk sriwidjaya

Alamat : Jl. Mayor Zen, Palembang, 30118 – INDONESIA

Telepon : +62-(711)-712222, 712111

Email : diklat@pusri.co.id

Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara sengaja dan pengambilan sampel dengan secara berantai, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran (2017:115) data primer adalah “Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi”.

2. Data Sekunder

Menurut Asep Hermawan dan Husni Leila Yusran (2017:115) data sekunder adalah “Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, membeli dari perusahaan – perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder dan lain – lain”.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pada teknik ini penulis akan melakukan pertanyaan – pertanyaan melalui percakapan maupun lisan kepada subjek penelitian, apabila terkait dengan informasi yang dirasa tidak dapat ditemukan

sumbernya dari data yang ada. Penulis melakukan wawancara dengan devisi pajak mengenai sistem dan prosedur perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Adapun yang di wawancarai adalah bapak Andika Oktareza, S. E.yang merupakan pegawai pada devisi pajak PT. PUSRI Palembang.

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap dokumen yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sistem prosedur penyetoran pajak, sistem prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. PUSRI Palembang

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti – bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen – dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tertulis manual maupun elektronik seperti pengumpulan data dengan cara pengutipan langsung terhadap data sistem perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. PUSRI Palembang.

3.3 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:335), analisa data adalah suatu proses yang mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, dijabarkan ke unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Hal tersebut mempermudah orang lain maupun diri sendiri untuk memahaminya. Analisis data kualitatif bersifat induktif yakni data yang diperoleh dianalisis kemudian disempurnakan pola hubungannya atau menjadi hipotesis. Adapun tahapan – tahapan analisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membuat flowchart prosedur siklus penjualan dan penerimaan.
2. Membuat langkah – langkah perhitungan SPT pertambahan nilai.
3. Membuat flowchart prosedur siklus pembelian dan pembaayaran.
4. Membuat flowchart prosedur pelaporan PPN.
5. Membuat langkah – langkah pelaporan pajak pertambahan nilai melalui e – filling.
6. Melakukan analisa hasil

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI) Palembang

PT Pupuk Sriwijaya Palembang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia. Sriwidjaja diambil sebagai nama perusahaan untuk mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatra Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina, pada Abad ke Tujuh Masehi. Pada tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pusri, karena pada saat itu dimulai pembangunan pabrik pupuk pertama kali yang dikenal dengan Pabrik Pusri I. Pada tahun 1963, Pabrik Pusri I mulai berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amoniak per tahun.

Wakil Perdana Menteri Chaerul Saleh menekan tombol tanda diresmikannya penyelesaian Pabrik Pusri I didampingi Direktur Utama Pusri Ir. Salmon Mustafa 4 Juli 1964. Seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat, selama periode 1972 – 1977 Pusri membangun Pabrik Pusri II, Pusri III dan Pusri IV. Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang 380.000 ton per tahun. Pada tahun 1992 dilakukan proyek optimalisasi urea Pabrik Pusri II dengan kapasitas terpasang sebesar 552.000 ton per tahun. Pabrik Pusri III dibangun pada 1976

dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun, sedangkan Pabrik Pusri IV dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Sejak tahun 1979, Pusri diberi tugas oleh Pemerintah melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 1993 dilakukan pembangunan Pabrik Pusri IB berkapasitas 570.000 ton per tahun, sebagai upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik dan untuk menggantikan Pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena usia dan tingkat efisien yang menurun. Pada tanggal 1997, Pusri ditunjuk sebagai induk perusahaan yang membawahi empat BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kaltim dan PT Pupuk Iskandar Muda serta satu BUMN yang bergerak di bidang engineering, procurement & construction (EPC), yaitu PT Rekayasa Industri. Pada tahun 1998, anak perusahaan Pusri bertambah satu BUMN lagi, yaitu PT Mega Eltra yang bergerak di bidang perdagangan. Pada tahun 2010 dilakukan pemisahan (Spin Off) dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja atau PT Pusri (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan pengalihan hak dan kewajiban PT Pusri (Persero)

kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagaimana tertuang di dalam RUPS-LB tanggal 24 Desember 2010 yang berlaku efektif 1 Januari 2011. Sejak tanggal 18 April 2012 Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri (Persero). Hingga kini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tetap menggunakan brand dan merk dagang Pusri.

4.1.2. Visi dan Misi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Sebagai dampak dari perubahan status menjadi anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC), pada tahun 2012 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan kajian tentang visi, misi, dan tata nilai Perusahaan. Hasil kajian akhir berupa visi, misi, makna dan tata nilai PUSRI kemudian disetujui oleh dewan komisaris dan disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/207/2012 tanggal 11 Juni 2012.

VISI

Menjadi Perusahaan pupuk terkemuka tingkat regional.

MISI

Memproduksi serta memasarkan pupuk dan produk agrabisnis secara efisien, berkualitas prima dan memuaskan pelanggan.

MAKNA

PUSRI untuk Kemandirian pangan dan kehidupan yang lebih baik.

4.1.3. Sarana dan Prasarana PT Pusri Palembang

Kesuksesan PT Pusri akan lebih bernilai. Jika kemajuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Itu sebabnya perusahaan telah menerapkan kebijakan pembinaan masyarakat lingkungan yang difokuskan pada pendekatan sosial ekonomi dan budaya, dengan sasaran pemberdayaan masyarakat.

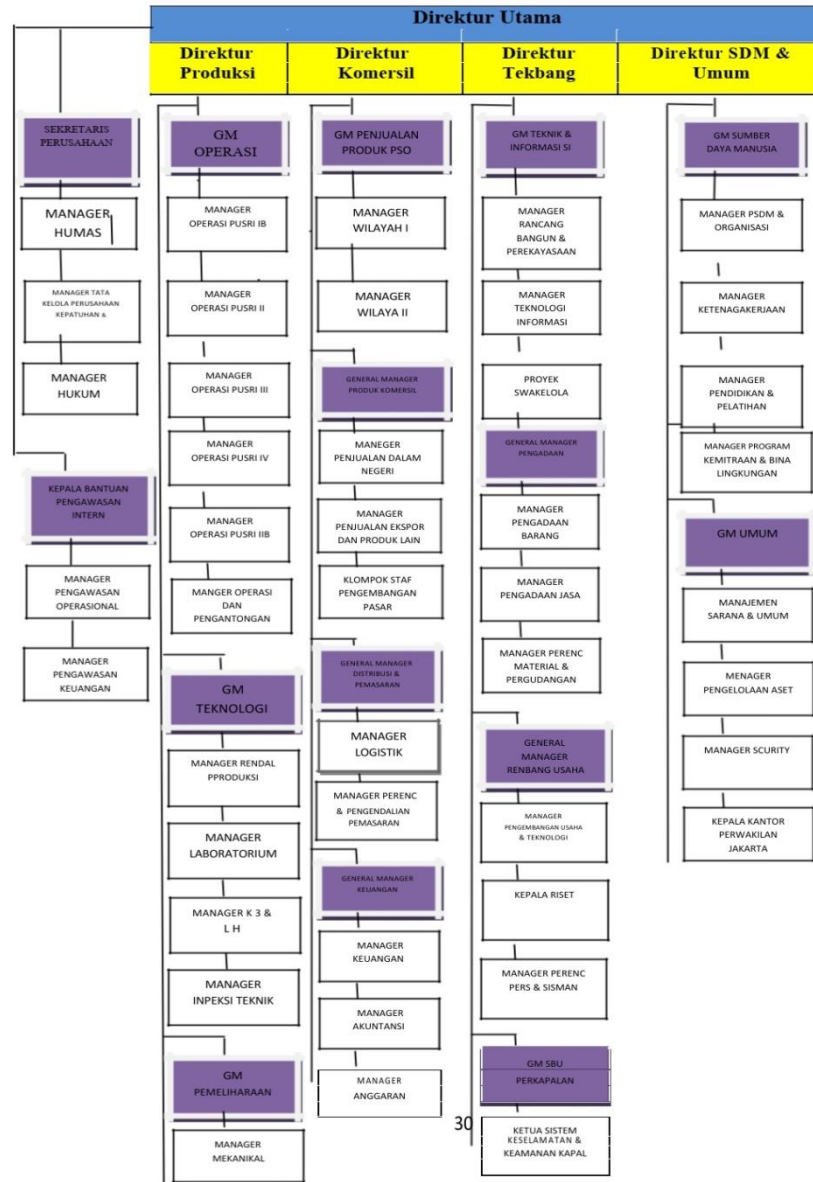
Untuk tahun 2016 penilaian kinerja lingkungan dari kementerian lingkungan hidup, PT Pupuk Sriwidjaja mendapat predikat “biru”. PT Pusri telah melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan kelompok usaha bersama, serta program infrastruktur yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, pembinaan program tenaga kerja melalui program pelatihan, pemagangan, dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan usaha mandiri. Program bantuan berkala yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan merata dalam setiap kelurahan, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bantuan sarana dan prasarana umum seperti sarana jalan, jembatan, tempat ibadah, pendidikan (beasiswa), fasilitas magang, penerangan jalan, kesehatan dan banyak lagi lainnya.

2. Bantuan sarana olahraga dan kesenian, termasuk bantuan dana dan prasarana untuk pelaksanaan PON XVI yang diselenggarakan di Sumatera Selatan.
3. Kesempatan kerja pada kegiatan tahunan perbaikan pabrik.
4. Pelatihan kewirausahaan, koperasi dan lingkungan.
5. Partisipasi aktif dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain dari hal tersebut diatas, PT Pusri juga membantu lingkungan dengan menyiapkan alat pemadam kebakaran, disamping untuk kebutuhan PT Pusri juga membantu kotamadya Palembang apabila terjadi kebakaran.

4.1.4. Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Sumber :

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT PUSRI Palembang

4.1.5. Tugas dan Wewenang Direktur PT PUSRI Palembang

Penjelasan Masing – masing bagian Sruktur organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terbagi dalam beberapa direktorat, yang masing – masing dipimpin oleh Direktur, yaitu:

a. Direktur Utama (Mulyono Prawiro)

Direktur Utama membawahi Direktur Produksi, Direktur Komersil (keuangan dan Pemasaran), Direktur Teknik dan Pengembangan, Direktur SDM dan Umum, Kepala satuan pengawasan *intern*, Sekretaris Perusahaan.

b. Direktur Produksi (Ir. Filius Yuliandi)

Direktur Produksi membawahi *General Manager* Pemeliharaan, *General Manager* Operasi, *General Manager* Teknologi.

c. Direktur Teknik dan Pengembangan (Listyawan Adi Pratisto)

Direktur Teknik dan Pengembangan bertugas untuk mengadakan pengawasan terhadap peningkatan efisiensi dan optimalisasi pabrik serta modifikasi peralatan yang ada, juga mengawasi berbagai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Direktur Teknik dan Pengembangan membawahi *General Manager* Teknik dan Pengadaan,

General Manager Renbag (Perencanaan dan Pengembangan) usaha dan *Gener l Manager* Teknik dan sistem informasi.

a Direktur Komersil (Muhammad Romli HM)

Direktur Komersil bertanggung jawab terhadap pengangkutan pupuk, Pemasaran, Pendistribusian serta bagian keuangan. Direktur Komersil membawahi *General Manager* Penjualan prroduk PSO, *General Manager* Penjualan prroduk Komersil, *Gener l Manger* Distribusi dan Pemasaran dan *General Manager* keuangan.

b Direktur SDM dan Umum (Bob Indriarto)

Direktur SDM dan Umum bertugas menyelenggarakan pengembangan dan penelitian serta mengadakan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perusahaan serta untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti peningkatan efisiensi.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPN PT PUSRI Palembang

1. Siklus Penjualan dan Penerimaan

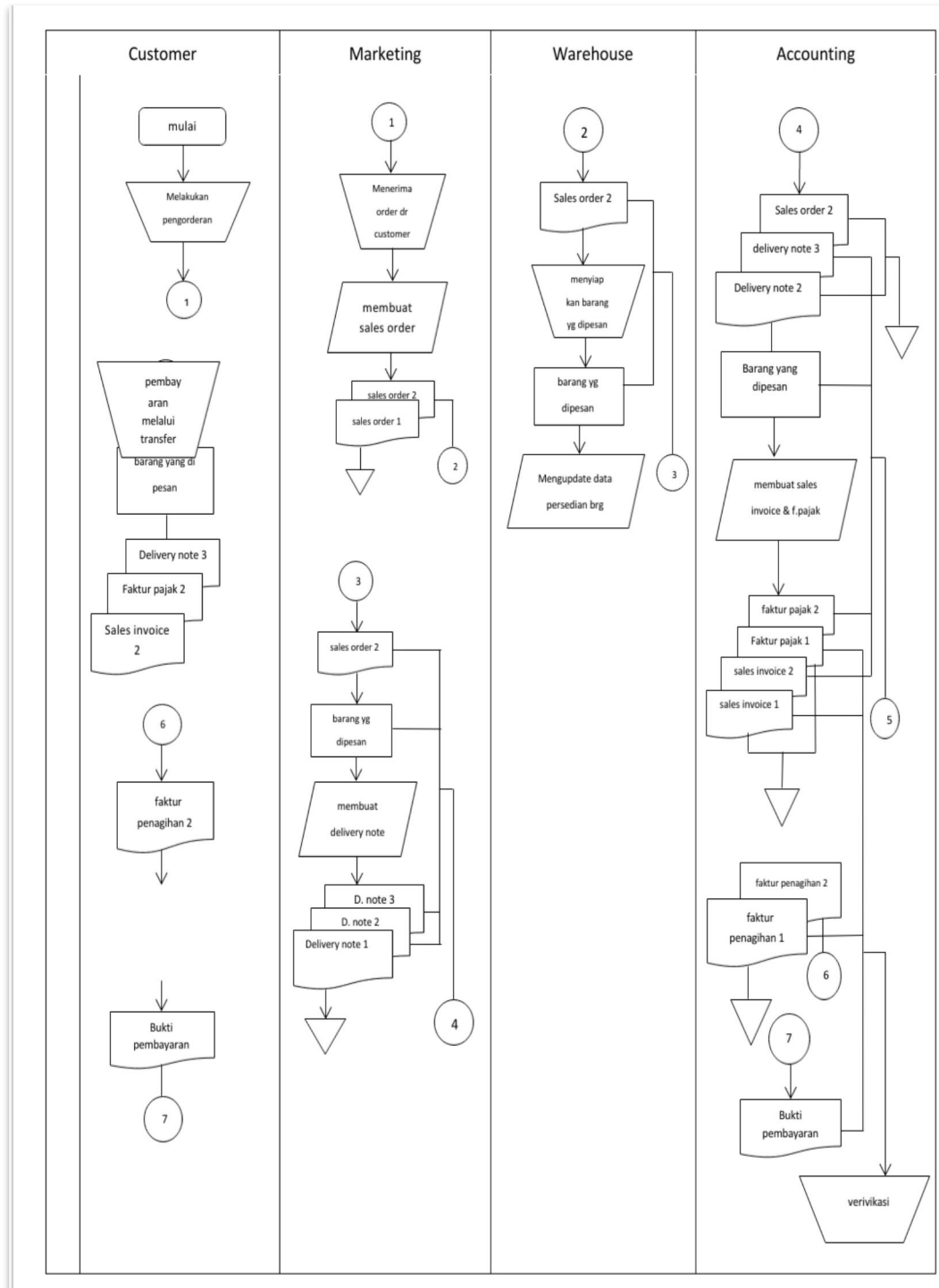
- a. Departemen *Marketing* menerima *Order* dari *customer*, membuat *Sales Order* 2 rangkap, 1 lembar *copy* ditujukan kepada Departemen Pergudangan (*Warehouse*) dan 1 lembar asli untuk arsip.

- b. Departemen *warehouse* menerima 1 lembar *copy Sales Order*, menyiapkan barang yang dipesan, lalu *update* data persediaan barang, dan memberikan 1 lembar *copy sales Order* kembali pada Departemen *Marketing*.
- c. Sebelum mengirim barang, Departemen *Marketing* membuat *Delivery Note* 3 rangkap berdasarkan keterangan pada *Sales Order*, 1 lembar asli untuk arsip, 1 lembar *copy* untuk dikirim bersama barang kepada *customer*, dan 1 lembar *copy* untuk Departemen *Accounting*.
- d. Departemen *Accounting* menerima 1 lembar *copy Sales Order* dan *Delivery Note* dari Departemen *Marketing*, dan membuat 2 rangkap *Sales Invoice* beserta 2 rangkap Faktur Pajak. Masing – masing 1 lembar *copy Sales Invoice* dan Faktur Pajak dikirim bersama barang kepada *Customer*.
- e. Selain itu, Departemen *Accounting* juga membuat 2 rangkap Faktur Penagihan, 1 lembar *copy* akan dikirim kepada *customer* saat mendekati jatuh tempo pembayaran, dan 1 lembar asli untuk arsip.
- f. Pada saat *customer* melakukan pembayaran melalui *transfer* kepada rekening bank yang dimiliki perusahaan, bank akan mengirimkan bukti bayar

customer kepada Departemen *Accounting*. Selanjutnya Departemen *Accounting* melakukan verifikasi dengan mencocokkan jumlah yang tertera pada bukti bayar bank dengan arsip *Sales Invoice*, Faktur Penagihan, dan Faktur Pajak. Setelah itu Departemen *Accounting* membuat kuitansi atas penerimaan pembayaran oleh *customer* tersebut dan dikirim kepada *customer*.

- g. Departemen *Accounting* seterusnya melakukan *update* pada *database* PPN Keluaran per bulan. Pada akhir bulan, data pada *database* tersebut bersama dengan *database* PPN Masukan per bulan dipindahkan ke program e-SPT PPN, selanjutnya cetak surat Pemberitahuan Masa PPN dan melaporkannya ke Kantor Pajak pada awal bulan berikutnya.

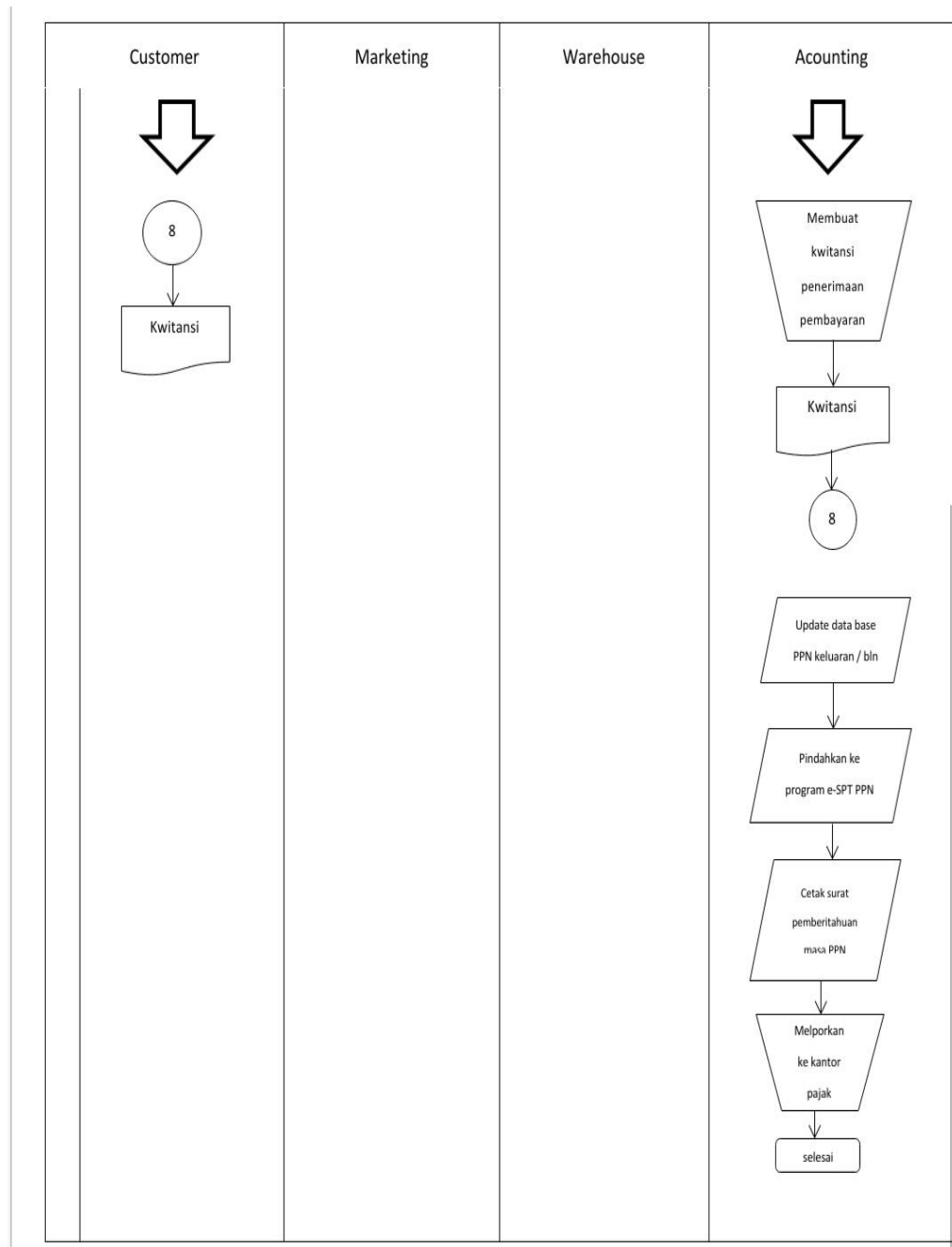
Berikut Gambar *Flowchart* Siklus penjualan dan penerimaan:



Sumber PT Pusri

Gambar 4.2

Flowchart Penjualan dan Penerimaan di PT Pusri Palembang



Sumber PT Pusri

Gambar 4.3

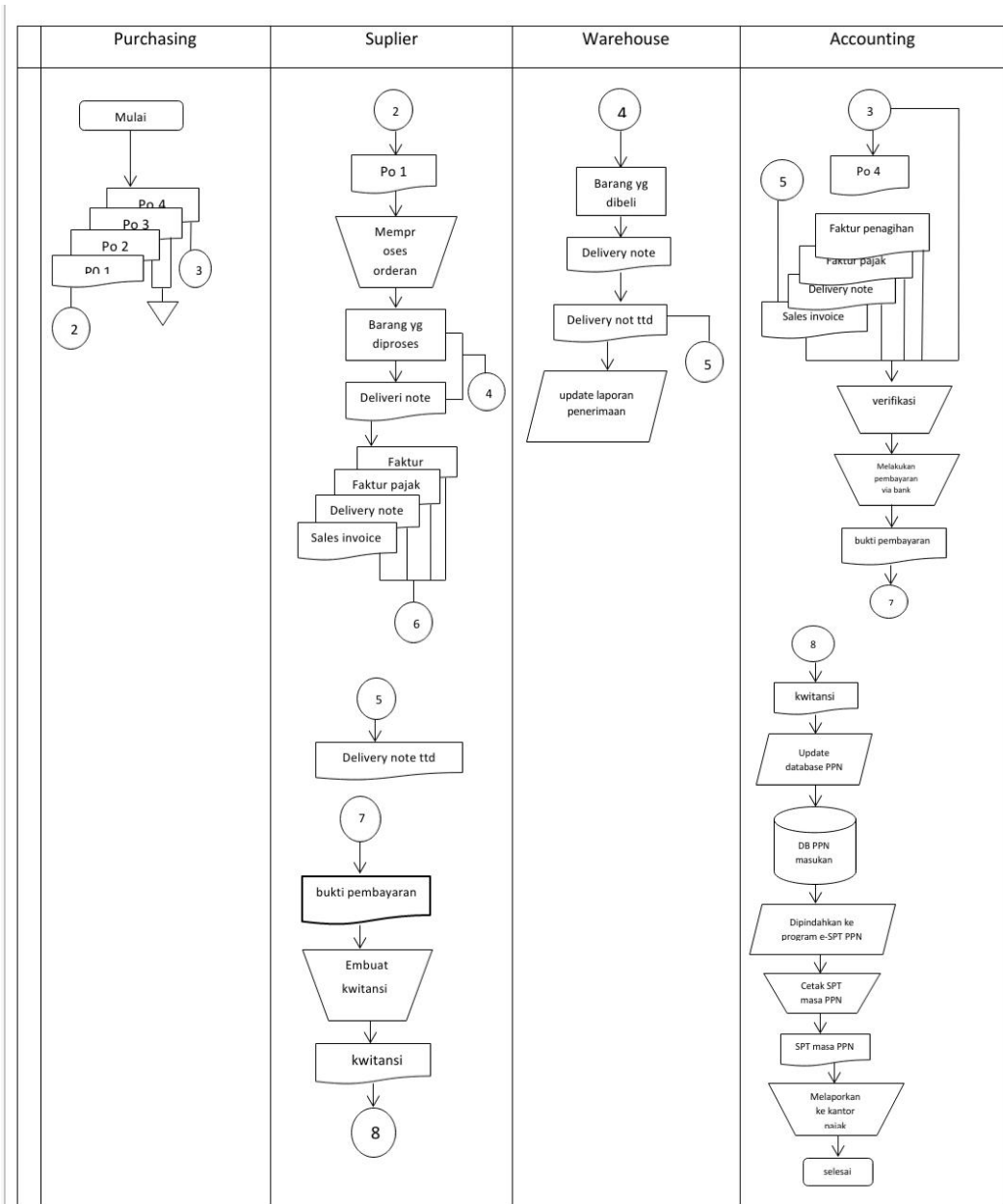
***Flowchart* Penjualan dan Penerimaan di PT Pusri Palembang**

2. Siklus Pembelian dan Pembayaran

- a. Departemen Purchasing membuat 4 rangkap *Purchase Order*. 1 lembar asli diberikan kepada *supplier*, 2 lembar *copy* untuk arsip, 1 lembar *copy* untuk Departemen *Accounting*.
- b. Barang yang dibeli diterima oleh Departemen Pergudagangan (*Warehouse*) dengan *copy Delivery Note* dari *supplier*, kemudian *Delivery Note* kembali ke *supplier* setelah ditandatangani penanggung jawab Departemen Pergudagangan. Departemen Pergudagangan juga mengupdate laporan penerimaan barang.
- c. Departemen *Accounting* menerima masing – masing 1 lembar *copy Sales Invoice, Delivery Note, Faktur Pajak, dan Faktur Penagihan* dari *supplier* dan melakukan verifikasi dengan mencocokkan semua dokumen tersebut dengan *Purchase Order* yang diterima dari Departemen *Purchasing*.
- d. Departemen *Accounting* melakukan pembayaran kepada *supplier* melalui *transfer bank*, dan bukti bayar akan diberikan oleh bank kepada *supplier*.
- e. *Supplier* membuat kuitansi penerimaan pembayaran yang dilakukan perusahaan dan mengirimkan kepada Departemen *Accounting*.

- f. Departemen *Accounting* seterusnya melakukan *update* pada database PPN Masukan per bulan. Pada akhir bulan, data pada *database* tersebut bersama dengan *database* PPN Keluaran per bulan dipindahkan ke program e-SPT PPN, selanjutnya cetak SPT Masa PPN dan melaporkannya ke kantor Pajak pada awal bulan berikutnya.

Berikut Gambar *Flowchart* Siklus pembelian dan pembayaran :



Sumber PT Pusri

Gambar 4.4

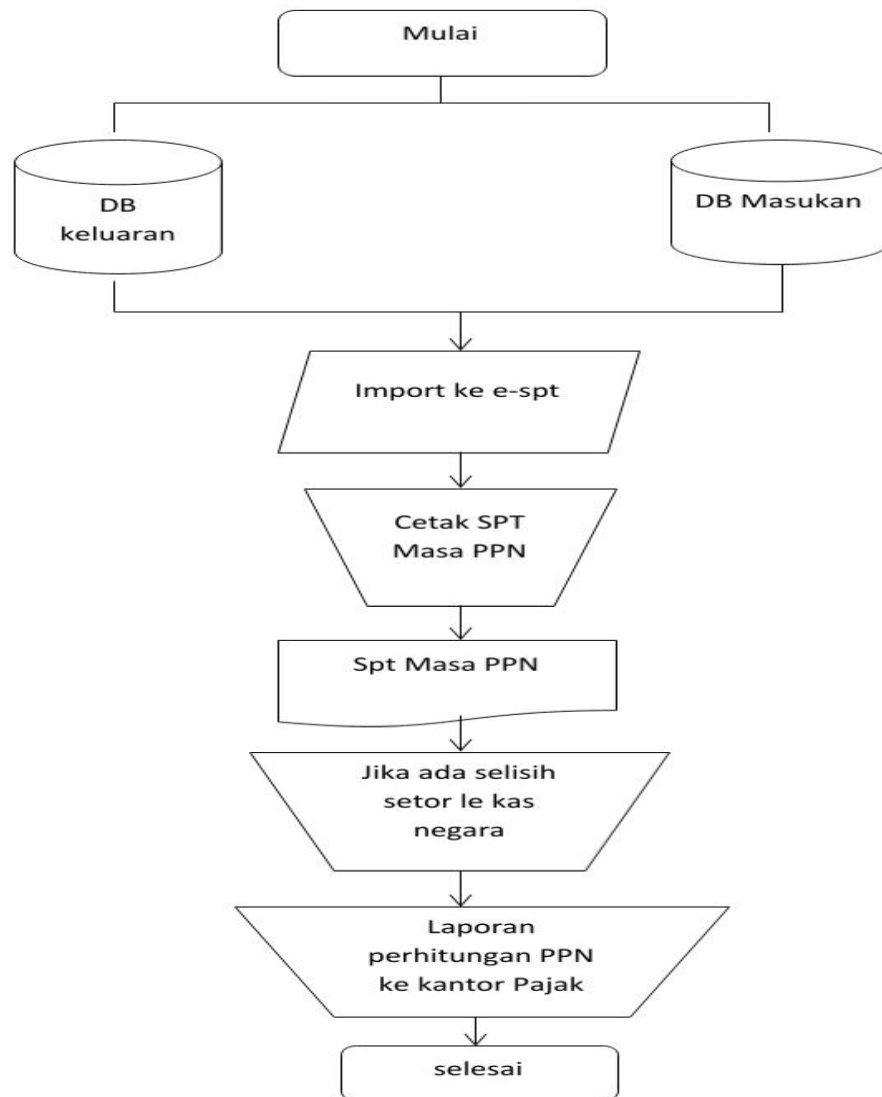
Flowchart Pembelian dan Pembayaran di PT Pusri Palembang

3. Pelaporan PPN

Prosedur pelaporan PPN Perusahaan terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan secara berulang tiap bulannya oleh *Supervisor Accounting*, sebagai berikut :

- a. Database PPN Keluaran dan Masukan disiapkan, dan diimport ke program e-SPT untuk menyusun SPT Masa PPN,
- b. Setelah data diimpor, SPT Masa PPN siap dicetak,
- c. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya disetor ke kas Negara selambat – lambatya tanggal 15 bulan berikutnya.
- d. Perusahaan menyampaikan Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke kantor Pelayanan Pajak terkait selambat – lambatya tanggal 20 bulan berikutnya.

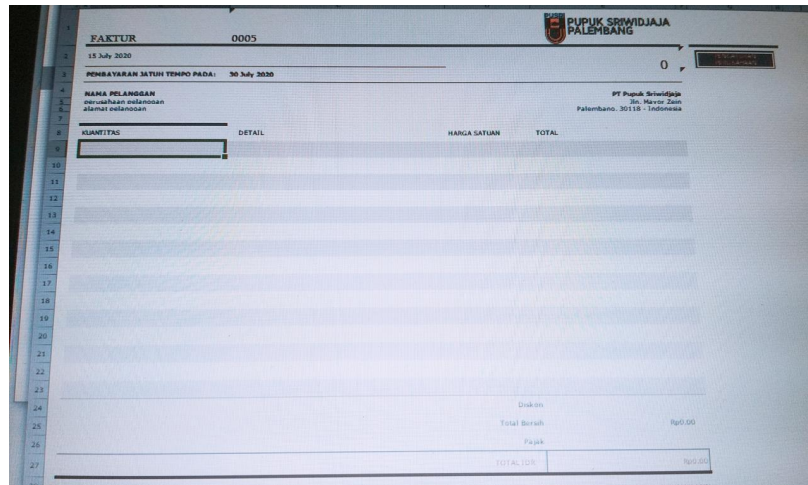
Berikut Gambar *Flowchar* Pelaporan PPN :



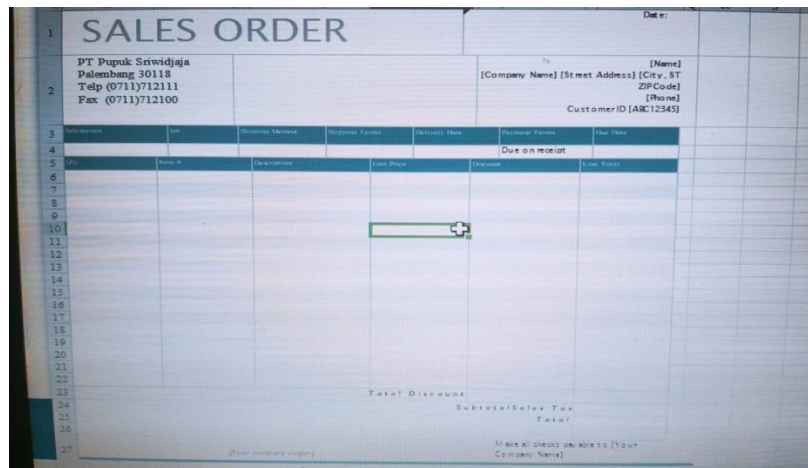
Sumber PT Pusri

Gambar 4.5

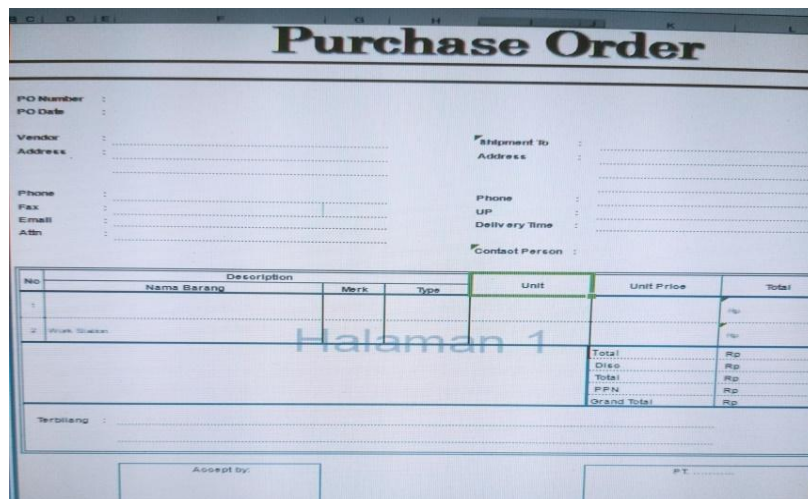
***Flowchart* Pelaporan PPN di PT Pusri**



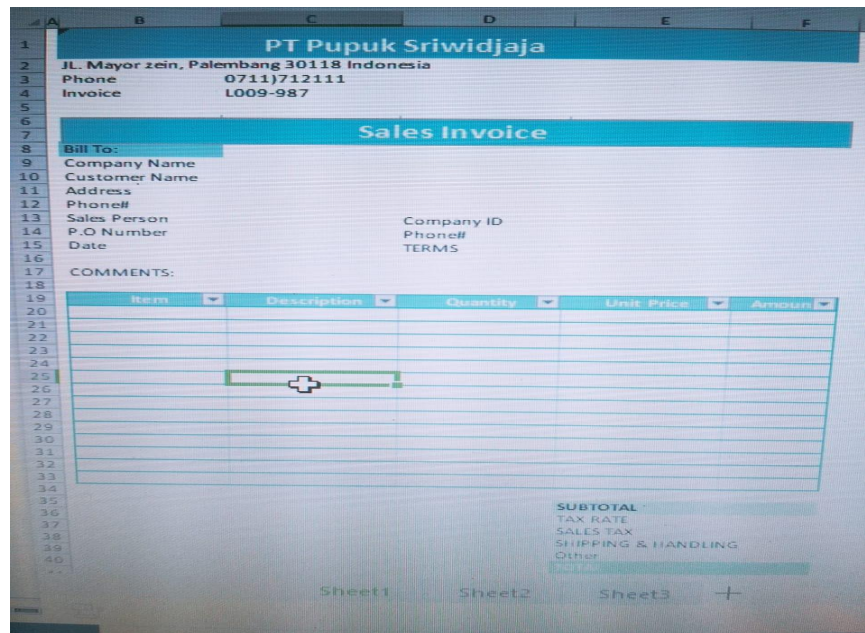
Gambar 4.8 Faktur Pembelian



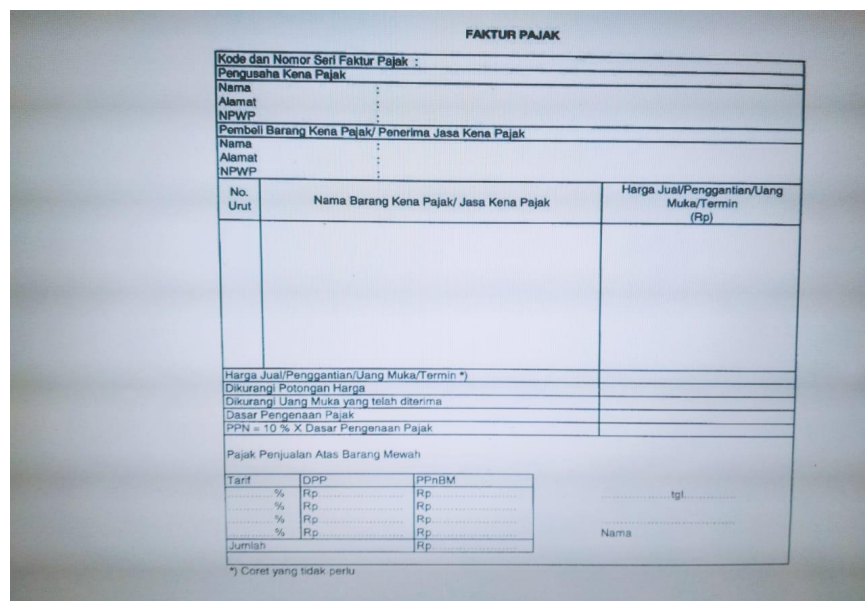
Gambar 4.9 Sales Order



Gambar 4.10 Purchase Order



Gambar 4.11 Sales Invoice



Gambar 4.12 Faktur Pajak

4.2.3 Cara pengisian e-SPT PPN

Berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan aplikasi e-Faktur:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Ketika Anda ingin menggunakan aplikasi e-Faktur, pastikan Anda memiliki NPWP terlebih dahulu. Jika belum memilikinya, Anda dapat mendaftar terlebih dahulu dengan persyaratan berikut:

- Mengisi Formulir Pendaftaran (unduh formulir pendaftaran NPWP Badan);
- Fotokopi KTP Pengurus Perusahaan (Direktur);
- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) salah satu pengurus atau Direktur;
- Salinan Akta Pendirian;
- Fotokopi Dokumen Izin Usaha atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Batasan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 197/PMK.03/2013, yang menyebutkan apabila omzet 1 tahun telah melebihi Rp4,8 miliar, maka PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila omzet di bawah Rp4,8 Miliar dan hendak dikukuhkan sebagai PKP, diperbolehkan. Apabila Perusahaan Anda bergerak sebagai Pengembang Properti, Anda juga diharuskan mengajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Meminta Kode Aktivasi dan Password

Setelah berstatus sebagai PKP, Anda perlu mengajukan Permintaan Kode Aktivasi dan Password. Kode dan Password tersebut nantinya akan digunakan untuk mengakses *website* e-Nofa di alamat resmi e-Faktur melalui laman resmi ini, Anda dapat meminta jatah nomor faktur secara *online*.

4. Mengajukan Permintaan Sertifikat Elektronik

Ajukan permintaan sertifikat elektronik dengan memenuhi dokumen persyaratan yang ditetapkan. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat yang bersifat elektronik, memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas. Selain itu, sertifikat elektronik juga menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

5. Mengaktivasi (Registrasi) Aplikasi e-Faktur

Cara Buat SPT Masa PPN melalui e-Faktur

Berikut cara membuat laporan SPT Masa PPN dengan aplikasi e-Faktur yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dengan mengikuti langkah-langkah mudah di bawah ini:

- Buka aplikasi e-Faktur,
- Pilih lokal database dan klik *connect*,
- Masukkan *username* dan *password* Anda, sesuai dengan pengaturan yang Anda buat pada saat daftar e-Faktur,

- Setelah masuk ke aplikasi e-Faktur, silahkan pilih menu SPT dan klik menu *posting*,
- Pilih menu SPT dan buka SPT, pilih masa pajak yang akan Anda laporkan. Setelah memasukkan masa pajak, klik “Buat File SPT (CSV)”, isi sesuai dengan SPT yang ingin Anda laporkan, klik OK jika muncul kotak dialog “SPT berhasil dibuat”,
- Cetak SPT induk dan lampiran AB, simpan file PDF di folder *Document* pada komputer Anda dengan klik *save* sampai muncul pesan “PDF SPT Induk dan AB Berhasil Dibuat”, lalu klik OK,
- Cetak file PDF yang sudah tersimpan di *document*, dan *copy* file CSV yang disimpan di *document* sebagai *backup*.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian tentang sistem informasi pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT PUSRI Palembang sudah rapi namun ada sedikit informasi atau keterangan yang kurang lengkap pada proses pengiriman barang di bagian siklus penjualan dan pembelian. Di bagian pembelian secara kredit sudah baik karena dari pihak *accounting* telah membuat faktur penagihan bila sudah mendekati jatuh tempo pembayaran, kurangnya info dokumen berupa kuitansi yang apakah kuitansi tersebut dicetak dari PT PUSRI sendiri atau kuitansi seperti biasanya yang ada

5.2 SARAN

1. PT. PUSRI sebaiknya menambahkan sedikit keterangan pengiriman barang pada siklus penjualan dan pembelian.
2. Pada dokumen keterangan kuitansi seharusnya diberikan penjelasan apakah kuitansi tersebut seperti kuitansi biasa atau kuitansi memang dibuat dari PT PUSRI itu sendiri.
3. semoga PT PUSRI dapat mempertahankan dan selalu meningkatkan kualitas sistemnya baik di bagian penjualan, penerimaan, pembelian dan pemabayaran pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Asep H., Husna L.Y. (2017). *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Depok : kencana.
- Azhar, S. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- Azhar, S. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan pertama. Lingga Jaya, Bandung.
- Bodnar, G.H., William S.H. (2010). *Accounting Information System*. Yogyakarta : ANDI.
- Davis, G.B. Kerangka Dasar : Sistem Informasi Manajemen. Bagian 1 Pengantar. Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Ke- Dua Belas. Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo.
- Djahir, Yulia & Dewi, P. (2015). *Bahan Ajar Sistem Informasi*, Yogyakarta : Deepublish.
- Herrina & Lili, S. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : ANDI
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: penerbit ANDI.
- Micleod, R. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Kakarta : Salemba Empat.
- Mira., Rusydi,M., & Alfian,M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (PERSERO) di Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan* Vol. 1 No.2, 6294
- Mulyadi (2014). *Akuntansi Biaya*. Edisi.5. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Romey, M.B & Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, alihbahasa : Kikin Sakinah Nur Safira & Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.
- Romney, M.B. & Stenbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, alihbahasa : kikin Sakinah Nur Safira 7 Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono (2011). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & B*. Bandung.

- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung
- Sujarweni, V. Wiranatta. (2015). *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku edisi revisi. Yogyakarta : Andi Offser.
- Waode, A.H. (2018). *Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT*. Bumi Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansu Manajemen* Vol.1 No.2, 0696

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Bapak Andika Oktareza,S.E.

Tanggal : 19 Maret 2020

Tempat : Ruang kerja divisi pajak PT Pupuk Sriwidjaja

Waktu :13.00 - 14.00

1. Sejak tahun berapa PT Pupuk Sriwidjaja mengukuhkan diri menjadi perusahaan kena pajak (pkp) ?
2. Kewajiban Pajak apa saja yang telah dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja?
3. Kegiatan utama dari PT Pupuk Sriwidjaja itu sendiri apa saja ?
4. Menurut bapak apa pengertian manajemen pajak ?
5. Apa perbedaannya dengan *Tax Planning* ?
6. Jadi menurut bapak apa itu *Tax Planning* ?
7. Apa PT Pupuk Sriwidjaja sendiri telah menerapkan *Tax Planning* dalam memenuhi kewajiban pajaknya terutama PPN ?
8. Metode *Tax Planning* apa yang Telah diterapkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja itu sendiri ?
9. Asal mula diterapkannya *Tax Planning* pada PT Pupuk Sriwidjaja sendiri bagaimana pak ?
10. Menurut Bapak apakah metode *Tax Planning* yang telah diterapkan oleh perusahaan sudah efektif dalam mengurangi beban PPN perusahaan ?

Lampiran 2

Daftar Jawaban Wawancara

Narasumber : Bapak Andika Oktareza,S.E.

Tanggal : 19 Maret 2020

Tempat : Ruang kerja divisi pajak PT Pupuk Sriwidjaja

Waktu :13.00 - 14.00

1. Kalau pusri sendiri itu sudah cukup lama menjadi wajib pajak ya tapi untuk tahun pastiny saya juga tidak begitu ingat seingat saya itu sekitar tahun 1980 an.
2. Untuk di pusri ini sendiri ada banyak kewajiban pajak yang telah dilaksanakan , itu ada PPH 21, PPH 22, PPH 23/26, PPH 25, PPH 29, PPN, Serta PBB.
3. Untuk kegiatan utama pusri sendiri itu di bidang produksi pupuk dan pendistribusin serta pemasaran pupuk bersubsidi di Indonesia, tapi ada juga penjualan pupuk yang tidak bersubsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya.
4. Menurut saya sendiri menejemen pajak itu adalah pemenuhan kewajiban pajak tapi pajak terutangnya sendiri sudah dapat ditekan dan diperkecil tanpa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
5. *Tax Planning* itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pajak dek, kan perencanaan pajak itu memiliki 3 fungsi nah salah satunya itu *Tax Planning*. Nah untuk artinya sendiri itu sangat rancu banyak yang

mengartikan perencanaan pajak ini sama dengan *Tax Planning* padahal itu kedua hal yang berbeda.

6. Kalau menurut saya *Tax Planning* itu pengertiannya hampir sama dengan perencanaan pajak tapi artinya itu lebih luas sih dek karna dalam *Tax Planning* itu sendiri ada yang sesuai undang-undang ada juga yang melanggar undang-undang.
7. Kalau untuk PT Pupuk Sriwidjaja ini sendiri tentu sudah menerapkan *Tax Planning* untuk PPN nya yang tentunya tanpa melanggar undang-undang.
8. Kalau untuk metode dek ya PT Pupuk Sriwidjaja ini untuk memperkecil beban PPN nya itu menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
9. Nah untuk asal muasal nya itu sendiri itu pada saat perusahaan ini mengalami terus menerus peningkatan pajak terutang dalam beberapa tahun sehinggal semakin kecil pula laba yang diperoleh oleh perusahaan, jadi para staf dan atasan menganalisis dari laporan keuangan dan rekapitulasi pajak perusahaan beberapa tahun tersebut setelah di analisis ternyata ada beberapa pajak masukan yang dapat dikreditkan dan setelah dihitung hitung cukup banyak mengurangi beban pajak perusahaan serta dapat meningkatkan laba dari perusahaan itu sendiri lalu tahun tahun berikutnya perusahaan sudah menggunakan *Tax Planning* dengan metode pengkreditan pajak masukan tersebut.

10. Kalau menurut saya sih sudah cukup efektif ya karena selain menurunkan beban pajak *Tax Planning* dengan metode ini sendiri bisa meningkatkan laba perusahaan juga